REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG

REPRESENTATION OF MUHAMMADIYAH IN DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL STUDY ON THE EXPANSION OF CITIZENSHIP REPRESENTATION BY MUHAMMADIYAH CADRES IN THE MAHYELDI-EMZALMI GOVERNMENT ERA IN PADANG CITY

Tesha Dwi Putri[1], Didi Rahmadi[2], Lara Indah Yandri[3], Meri Anggraini[4]
[1] Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik, didirahmadi@hotmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik, tesha.dwiputri@gmail.com
[3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik, laraindahyandri@gmail.com
[4] Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, meryarifin26@gmail.com

***ABSTRAK**:* Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya, Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (*social networking*) yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dalam memberikan akses kepada kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan pola-pola respon kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu'amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (*high politics*) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik *(low politics*). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.

Kata Kunci*:* Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal

ABSTRACT: *Support for public issues carried out by religious organizations has not yet become the main focus (Hiarej & Stokke, 2017). Religious-based organizations such as Muhammadiyah are still dealing with issues of religious identity, Muhammadiyah tends to ignore when it comes to basic issues. Of course, as an organization that has the most established social networking. In this connection, this study will answer research questions including: 1) what is the role of Muhammadiyah especially at the local level in strengthening democratic ideas; 2) What is the description of the role of Muhammadiyah cadres who are elected as council members and regional heads in providing access to civil society groups in fighting for policies that are in favor of public issues. This study aims to describe any public issues that get the attention of Muhammadiyah, then the researcher also describes the response patterns of Muhammadiyah cadres who sit in political positions to issues of citizenship. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. One way to achieve political ideals through Muhammadiyah cadres is the establishment of a system based on religious values. This means that Muhammadiyah cadres who enter the political system must adhere to high politics which emphasizes the inculcation of religious moral ethics in every individual Muslim. This effort is pursued through an educational process in order to form human beings who ethically have self-integrity. Therefore, equipping them with sufficient religious knowledge is expected to be able to fortify themselves from actions and policies that are detrimental to the people they lead. Although Muhammadiyah institutionally tends to supreme politics, there are also its members who are active in political parties (low politics). Muhammadiyah views that politics in Indonesia today leads to pragmatic political behavior.*

Keywords: *Muhammdiyah, Modern Islam, Local.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, beragam persoalan pokok dari stagnasi demokrasi di Indonesia diasumsikan terletak pada soal ketimpangan representasi (Priyono & Hamid, 2014). Representasi sering menjadi tolok ukur kualitas demokrasi selain partisipasi. Lewat konsep ini, kepentingan publik dapat hadir dan kuat apabila keterwakilannya memiliki kualitas sehingga berdampak kepada nilai dari demokrasi itu sendiri. Karena itu, kelembagaan demokrasi dapat tegak dan berjalan secara optimal apabila ditopang oleh keterbukaan akan keterwakilan publik yang akuntabel dan luas (Priyono & Hamid,
2014).Sehingga, representasi yang akuntabel serta transparan dapat mencegah praktik-praktik politik yang elitisan eksklusif.

Di dalam Hiariej & Stokke (2017) penguatan demokrasi terutama di level lokal mensyaratkan penguatan masyarakat dan perluasan representasi sosial demokrasi yang ditandai dengan kuatnya organisasi masyarakat sipil. Selama ini berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Malahan, beberapa kader yang memiliki jabatan politik terjebak dalam birokrasi
sempit dan gagal menjadi penyampai gagasan pembaharuan Muhammadiyah.

Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (social networking) yang paling mapan, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk ambil bagian dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Lewat kader-kadernya yang terpilih dalam kandidasi pemilukada maupun yang duduk menjadi anggota legislatif, gagasan pembaharuan Muhammadiyah akan turut membantu memperbaiki dan memperluas kualitas demokrasi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dibawah ini: 1) apa peran

Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dalam memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?.

Tujuan penelitian Untuk mendeskripsikan peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam mengusung hak-hak kewargaan. Untuk mencapai tujuan pertama, maka penelitian ini juga bertujuan untuk: a) mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah; b) Mendeskripsikan pola-pola respon kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan.

Hasil penelitian ini nantinya berguna untuk mengetahui perkembangan Muhammadiyah di tingkat lokal serta gagasannya yang berkembang terutama terkait dengan penguatan demokrasi lokal. Pengetahuan ini berguna untuk melihat Muhammadiyah dari sisi yang berbeda yang lebih fokus kepada perhatian Muhammadiyah terhadap isu-isu yang lebih umum dan sektoral. Kemudian hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuna tentang demokrasi substansial di Indonesia dan gerakan masyarakat sipil yang berbasiskan keagamaan. Oleh karena itu, publikasi ilmiah dalam seminar ilmiah, jurnal nasional akan dihasilkan oleh penelitian ini akan menyumbang literature dalam bidang politik kewargaan, masyarakat sipil, dan demokratisasi.

Ada beberapa temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini diantaranya; teridentifikasinya keterlibatan Muhammadiyah dalam bentuk peran langsung baik berupa gagasan dan pendampingan terhadap penguatan demokrasi. Kemudian ditemukannya pola-pola dukungan kader-kader Muhammadiyah terhadap perluasan ruang representasi warga terhadap kebijakan yang dihasilkan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif yang dipakai pada penelitian ini adalah studi kasus (*case studies*). Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan dua cara yaitu: wawancara mendalam (indepht interview). Wawancara dilakukan dengan informan yang merupakan Pimpinan Wilayah Sumatera Barat (PWM) Periode 2015-2020, pertama Sekretaris PWM Sumbar Bapak Drs. H. Adrian Muis, Ch. Saripado. kemudian informan dua yaitu Ketua Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, Bapak Murisal, S.Ag., M.Pd. Disamping wawancara, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi, terhadap laporan yang telah dipublikasikan ataupun dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, teknik dokumentasi juga digunakan jika ada bahan-bahan/dokumen-dokumen penting sebagai pendukung dari data yang sudah didapatkan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Analisis yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman makna tersebut peneliti melakukan analisis lebih lanjut dengan berupaya mencari makna dengan menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, yang terdiri dari empat alur kegiatan yaitu:

1. Tahap pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti melakukan data dengan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan sejak awal seperti wawancara dan dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data berupa kata–kata, foto, fenomena, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh.

2. Reduksi Data. Pada tahap ini peneliti melakukan suatu bentuk analisa yang tujuannya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa.
3. Penyajian Data. Pada tahap ini peneliti memaparkan kumpulan informasi yang ada telah tersusun secara sistematis dan memberikan penarikan kesimpulan, serta pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah di sajikan.
4. Penarikan Kesimpulan Verifikasi. Tahap ini merupakan suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang bertujuan untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan kegiatan pemikiran kembali yang melintas kembali dalam pikiran peneliti selama mencatat suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, hal ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari makna dan informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang *grounded*.

Gambar I. 2 Model Interaktif Analisa Data Miles dan Huberman

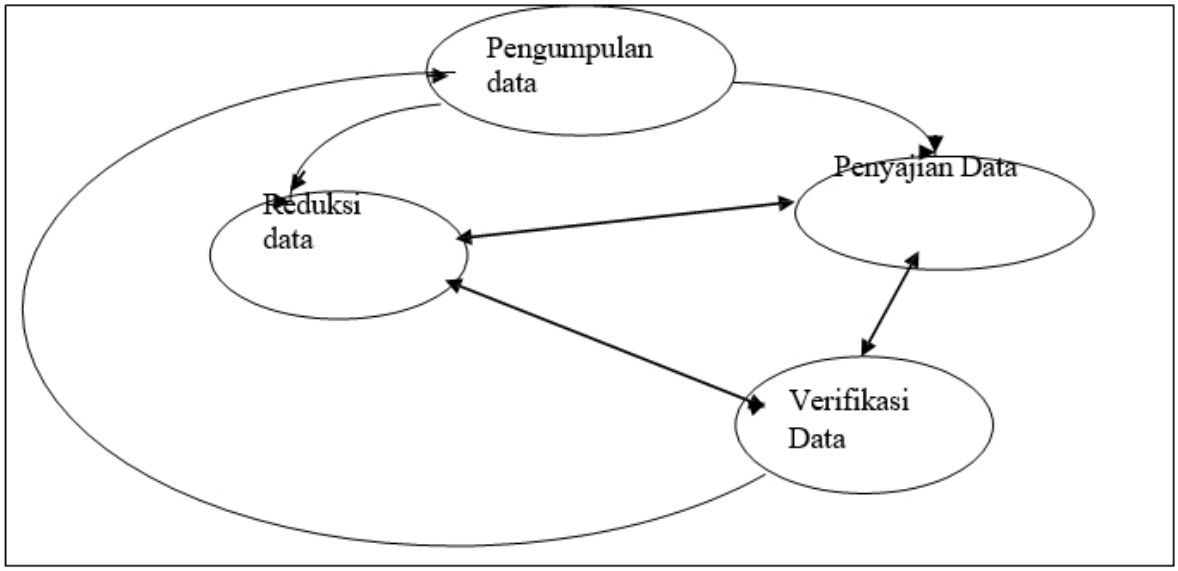

Gambar I▸2 Model Interaktif Analisa Data Miles dan Huberman

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Muhammadiyah di Tingkat Lokal

Muhammadiyah telah hadir sebagai ormas Islam yang berhasil memberikan dorongan terhadap perubahan sosial dan ekonomi ummat. Telah banyak pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap kontribusi Muhammadiyah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keislaman. Meski demikian, masih banyak cita-cita Muhammadiyah dalam mengembang misi pembaharuan Islam belum terealisasi dengan baik. Termasuk memperluas gagasan-gagasan perjuangan Islam yang lebih kontekstual dimana masalah-masalah keummatan semakin dinamis dan luas (Suara Muhammadiyah 23:5:2019).

Tugas Muhammadiyah di era disrupsi teknologi menuntut para anggota, kader, dan pimpinan di seluruh lembaga Muhamadiyah harus bersinergi dan tidak reaksioner dalam

melihat keadaan. Kuatnya pengaruh kapitalisme global turut mempengaruhi kondisi sosial politik ummat di Indonesia. Akibatnya terjadi perubahan-perubahan kontras yang berpengaruh terhadap perilaku dan sikap umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagai gerakan amal ma'ruf nahi munkar tentunya juga bisa tampil dalam menanggapi masalah- masalah publik yang non keagamaan.

Sebagai gerakan pencerahan yang didasarkan semangat keagamaan, Muhammadiyah menekankan kepada para kadernya untuk turut menyebar semangat berkemajuan didasarkan kepada spirit Islam. Didasarkan kepada keputusan Tanwir Muhammadiyah 2019 di Bengkulu, spirit keagamaan kader-kader Muhammadiyah didasarkan pada semangat yang mencerahkan, perjuangan menghadapi sesuatu didasarkan pada jawaban alternatif untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, gerakan pencerahan tidak hanya berkaitan dengan masalah praktik ibadah tetapi terlibat berjuang menjawab isu-isu korupsi, kerusakan ekologis, intoleransi, hak masyarakat ada dan perlindungan terhadap kelompok-kelomok minoritas (Suara Muhammadiyah 23:7:2019).

Sumatera Barat merupakan provinsi yang menjadi basis Muhammadiyah. Telah banyak terlihat aktivitas-aktivitas politik oleh organisasi Islam ini. Di lapangan peneliti melihat banyak indikasi yang mengarah pada adanya keterlibatan para elit pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, baik itu Kota Padang, sampai Kota Padang Panjang sebagai daerah kelahiran Buya Hamka (Pendiri Muhammadiyah Sumatera Barat). Bentuk keterlibatan lain dapat dilihat para elit pimpinan Muhammadiyah dalam konstelasi Pilkada. Pimppinan elit yang terpilih juga tampak memberikan kontribusi bagi daerah pasca memimpin. Sebut saja Bapak Ali Mukhni, mantan Bupati Padang Pariaman dalam empat tahun kepemimpinan memperlihatkan progress yang signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Padang Pariaman. Selain itu perubahan yang dibawa Muhammadiyah dan PKS sebagai partai politik yang didominasi oleh kader Muhammadiyah juga berperan besar bagi masyarakat Sumatera Barat.

Peran Muhammadiyah bagi Sumatera Barat dirasakan khususnya melalui kader-kader yang masuk dalam sistem politik, seperti anggota partai politik (Partai keadilan Sosial) ataupun elit politik daerah. Pemerintah mempunyai kecendrungan pada karakteristik yang koorperatif-akomodatif yaitu mampu selalu berpartisipasi aktif dan bekerjasama secara baik tanpa ada terindikasi konflik walaupun sedikit. Akomodatif artinya para pemimpin Muhammadiyah merasa semua kebijakan Pemerintah Kota sejalan dan sesuai dengan agenda masyarakat secara umum serta Muhammadiyah secara khusus.

Faktor yang mendorong pimpinan Muhammadiyah melakukan hubungan dengan partai politik pada dasarnya dipengaruhi faktor identitas primodial karena kedekatan hubungan pribadi seperti karena orang Muhammadiyah, dan kedua faktor personal yaitu kedekatan para elit dengan tokoh maupun karena kedekatan emosional elit dengan tokoh tersebut. Anggota Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik pemerintahan daerah cendrung merepresentasikan nilai-nilai Muhammadiyah *amal ma'ruf nahi mungkar* dalam bertindak. Identitas keislaman melekat pada personal elit politik, sehingga mengurangi kecurangan-kecurangan dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Peran kader Muhammadiyah dan Gagasan Demokrasi

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-sunnah yang dikenal sebagai identitas perjuangannya. Begitu juga dalam hal bersikap mengenai politik, Muhammadiyah

berusaha memberikan makna berdasarkan prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengalaman terlibat dalam dinamika politik praktis menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah. Pertarungan tarik menarik kepentingan telah membatasi ruang gerak Muhammadiyah dan membentuk polarisasi politik dan ideologi menjadi tajam (Nashir, 2019).

Meski demikian, Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu'amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa. Dalam setiap pandangan tentang politik, ada ruang-ruang yang membentuk sikap Muhammadiyah dalam politik yaitu keleluasaan ide politik Muhammadiyah bersandar kuat kepada nilai-nilai ideologis agama. Artinya, nilai-nilai yang diperintahkan dalam Islam wajib dijalankan dalam politik, sebaliknya menghindar atau menjauh ketika perbuatan tersebut dilarang.

Pandangan Muhammadiyah terhadap politik telah secara tegas disampaikan lewat khittah Denpasar 2002. Dalam khittah tersebut menegaskan bahwa politik adalah ajaran yang harus dijiwai dalam satu nafas moral Islam. Sebab, politik bisa menjadi jalan terhadap usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara (alhamdi, et.al:2019). Salah satu konsep yang khas dari Muhammadiyah dalam menjawab kritikan atas dominasi dimensi ritual adalah gagasan tauhid sosial. Konsep ini menjadi penyimpul atas berkembangnya dimensi trasnformatif yang menciptakan Muhammadiyah lebih luwes berbicara politik, sosial dan lokalitas budaya (Hilman,
2017).

Politik juga sempat membawa Muhammadiyah pada posisi yang dilematis. Organisasi ini memiliki kader-kader dari berbagai latar belakang pendidikan sekaligus juga ketertarikan terhadap politik. Seperti yang disampaikan oleh Bahtiar Effendi dalam tulisannya Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah, energi besar kader-kadernya terhadap ketertarikan dalam politik tidak mampu dikelola dengan baik oleh Muhammadiyah. Hal yang sering muncul malah benturan sesama kader akibat perbedaan pandangan politik. Dalam hal ini Muhammadiyah menghabiskan banyak energi terhadap menyebabkan benturan-benturan kepentingan.

Setelah lebih 20 tahun era reformasi berjalan, demokratisasi menjadi kaca pembesar yang sangat bermanfaat untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Dampak diatas juga mengisyaratkan bahwa hubungan antara warga negara Indonesia dan negara sedang mengalami perubahan, sejalan dengan terjadinya perubahan politik dan sosial. Begitu juga Muhammadiyah ditingkat lokal, ruang politik yang tersedia juga dimanfaatkan baik oleh para kader-kadernya maupun juga secara organisasi. Munculnya peluang dalam ranah politik turut menarik perhatian para kader Muhammadiyah untuk bersinggungan dengan politik.

Seperti yang dijelaskan oleh Adrian Muis Sekretaris PWM Muhammadiyah bahwa pada prinsipnya Muhammadiyah memberikan ruang-ruang yang besar bagi kader Muhammadiyah untuk berkontribusi bagi kemaslhatan ummat. Tidak ada sedikitpun Muhammadiyah alergi untuk masuk dalam ranah politik asal tetap sejalan dengan prinsip-prinsip khittah Muhammadiyah pada tahun 2002. Lebih lanjut, Muhammadiyah turut mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam konstestasi jabatan publik. Tujuan ini dilakukan agar Muhammadiyah melalui kader-kadernya mampu memperluas gagasan-gagasan perjuangan Muhammadiyah. Besar harapannya, para kader Muhammadiyah yang dititipkan dalam pemerintahan mampu memberikan keberpihakan dan dukungannya terhadap persoalan kebangsaan.

Di dalam tulisan Azaki Khoirudin, Dakwah Wasathiyah: Manhaj Amar Makruf Nahi Munkar Muhammadiyah menyebutkan bahwa dakwah Muhammadiyah mengedepankan pesan- pesan yang amaliah sekaligus solutif. Sekaligsu menegaskan karakter dakwah yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yaitu dakwah non konfrontatif yang mengedepankan penanaman nilai-nilai Islam yang didasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, didalam politik, Muhammadiyah menganut politik adiluhung atau high politics yang menekankan kepada pelaksanaan etika moral di seluruh individu muslim.

Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik, yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Muhammadiyah telah lama menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik. Para politisi dengan mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru serta menjadikan politik bukan sebagai lahan perjuangan untuk menciptakan sistem sosial yang baik, tetapi 50 50 sebagai lahan mencari keuntungan materi. Kecenderungan ini menimbulkan perilaku politik yang mengedepankan kepentingan diri dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara (Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, 2009). Tradisi politik seperti ini lebih mengedepankan kompromi politik yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek dan mendorong terjadinya praktik politik transaksional dan uang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

   Peran Muhammadiyah bagi Sumatera Barat dirasakan khususnya melalui kader-kader yang masuk dalam sistem politik, seperti anggota partai politik (Partai keadilan Sosial) ataupun elit politik daerah. Pemerintah mempunyai kecendrungan pada karakteristik yang koorperatif-akomodatif yaitu mampu selalu berpartisipasi aktif dan bekerjasama secara baik tanpa ada terindikasi konflik walaupun sedikit. Akomodatif artinya para pemimpin Muhammadiyah merasa semua kebijakan Pemerintah Kota sejalan dan sesuai dengan agenda masyarakat secara umum serta Muhammadiyah secara khusus.

   Faktor yang mendorong pimpinan Muhammadiyah melakukan hubungan dengan partai politik pada dasarnya dipengaruhi faktor identitas primodial karena kedekatan hubungan pribadi seperti karena orang Muhammadiyah, dan kedua faktor personal yaitu kedekatan para elit dengan tokoh maupun karena kedekatan emosional elit dengan tokoh tersebut. Anggota Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik pemerintahan daerah cendrung merepresentasikan nilai-nilai Muhammadiyah *amal ma'ruf nahi mungkar* dalam bertindak. Identitas keislaman melekat pada personal elit politik, sehingga mengurangi kecurangan-kecurangan dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Saran

   Sebagai organisasi masyarakat Islam yang cukup kuat dan besar di Sumatera Barat yang berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman dengan mengedepankan etika dan moral yang baik sepatutnya Muhammadiyah mendorong agar lebih banyak kader yang ikut serta dalam konstelasi politik. Kemudian Muhammadiyah melalui pimpinan organisasi disarankan

untuk memasukkan program-program yang memiliki dampak empirik bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat secara luas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bagir, dkk., (2015). Pluralisme Kewargaan (1st ed., p. 43). Jakarta: Mizan. Bungin, Burhan, 2007.
penelitian kualitatif. Jakarta: Perpustakaan Nasional

Hiariej, E., & Stokke, K. (2017). Politics of citizenship in Indonesia (1st ed., pp. 3,13,25). Jakarta:
Pustaka Obor.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi
Kedua. Jakarta: Erlangga

Jurnal Maarif, (2010). Kepemimpinan Muhammadiyah dan Masa Depan Pembaharuan Islam Indonesia.5(1), 3, 103.

Jurnal Maarif, (2009). Simpang Jalan-Simpang Jalan Muhammadiyah. Maarif,4 (2), 20.

Jurnal PolGov, (2016). Monograph Politics & Government, 10(1), 2. Muhadjir, Noeng, 2000, Metode
Penelitian Kualitatif, Jogja: Rake Sarasin.

Priyono, A., & Hamid, U. (2014). Merancang Arah Baru Demokrasi (1st ed., pp. 151, 225, 399,
749). Jakarta: KPG.

Pitkin, H. (1969). Representation. New York.

Valentina, T. (2018). Dinamika Politik Lokal Di Minangkabau (1st ed., p. 4). Depok: Rajawali Press.